



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPRRI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Selatan.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI/F-P.GOLKAR
2.	ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
3.	BAMBANG D.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
4.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	ANGGOTA / F-P. GOLKAR
5.	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. GOLKAR
6.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA / F-P. GOLKAR
7.	Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA / F-P. GOLKAR
8.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.	ANGGOTA / F-P. GERINDRA
9.	BAMBANG HARYADI, S.E.	ANGGOTA / F-P. GERINDRA
10.	EVA YULIANA, M.Si.	ANGGOTA / F-P. NASDEM
11.	N.M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn.	ANGGOTA / F-PKB
12.	H. SANTOSO, S.H.	ANGGOTA / F-P. DEMOKRAT
13.	Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.	ANGGOTA / F-PKS
14.	SARIFUDIN SUDDING, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-PAN

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional dan Bagian Pemberitaan dan TV Parlemen.

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari 2 – 6 Maret 2020.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajarannya.
3. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kapolda dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK DENGAN KAPOLDA, KEPALA BNNP, KAJATI, KAKANWIL KEMENKUMHAM DAN KETUA PENGADILAN TINGGI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. Pertemuan dengan Kepala Kanwil Sulawesi Selatan Kemenkumham RI

a) Anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 297.338.003.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ribu rupiah). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 21.363.105,- (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus lima juta rupiah) bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 318.701.108.000,- (tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Adapun kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebesar Rp 54.129.233.000,- (lima puluh empat miliar seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
2. Optimalisasi layanan masyarakat guna mendukung pelaksanaan sistem masyarakat untuk mewujudkan Lapas/Rutan dengan standar *maximum*, *medium* dan *minimum security* dengan renovasi gedung Lapas/Rutan sebesar Rp 86.636.027.000,- (delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
3. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mendapatkan bantuan hibah tanah dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan seluas 50 Ha untuk pembangunan Lapas Terpadu, namun belum dialokasikan anggaran untuk pembangunan Lapas Terpadu dimaksud.

b) Pengawasan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan memiliki 28 Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang terdiri dari 8 UPT Lembaga Masyarakat (Lapas), 15 UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan), 1 UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 3 UPT Balai Masyarakat (Bapas) dan 1 UPT Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan). Dari 24 Satker Lapas/Rutan/LPKA di wilayah Sulawesi Selatan, 21 diantaranya mengalami *over crowded* dengan kondisi rata-rata kelebihan hunian sebesar 91%. Data *over crowded* di wilayah Sulawesi Selatan per tanggal 27 Februari 2020 sebagai berikut:

Jumlah UPT Lapas/Rutan : 24 UPT

Kapasitas : 5.843 orang

Jumlah Penghuni : 11.136 orang

Prosentase *Over Crowded* : 91%

Redistribusi WBP di lingkungan internal wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 1.782 orang. Berdasarkan data per tanggal 27 Februari 2020, jumlah penghuni Lapas/Rutan kasus Narkotika sebanyak 5.718 orang atau 65% dari 11.300 orang jumlah keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sementara 1 UPT Lapas Narkotika di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 360 orang, saat ini telah diisi penghuni sebanyak 998 orang atau mengalami *over crowded* mencapai 177%. Adapun rincian 5.718 orang penghuni kasus narkotika per tanggal 27 Februari 2020 sebagai berikut:

Produsen : 17 orang;
Bandar : 1.386 orang;
Pengedar : 2.946 orang;
Pengguna : 2.840 orang;
Penadah : 610 orang;
Diluar klasifikasi : 84 orang.

Terkait pengawasan keimigrasian di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, telah dibentuk tim khusus Polisi Khusus Keimigrasian (Polsus IM) yang bertugas memonitor, memantau, dan mengecek secara berkala apabila ada penerbangan internasional baik keberangkatan (*departure*) maupun kedatangan (*arrival*). Selain tim khusus tersebut, kegiatan pengawasan keimigrasian di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga dilaksanakan oleh petugas *immigration counter* dengan melakukan interview secara mendalam untuk mengetahui maksud dan tujuan keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan di Indonesia. Jika terdapat hal mencurigakan terkait keberangkatan ataupun kedatangan dari penumpang penerbangan internasional, maka petugas *immigration counter* akan melakukan koordinasi dengan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan keimigrasian di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yakni *layout* antrian yang diberikan pihak PT Angkasa Pura II kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk digunakan sebagai *immigration counter* sangat kecil dan tidak representatif dengan jumlah penerbangan internasional di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Hal tersebut semakin membuat petugas imigrasi kewalahan menangani antrian jika terdapat dua jadwal penerbangan internasional secara bersamaan, karena beberapa perusahaan maskapai penerbangan telah menyediakan rute internasional dari dan ke Makassar di antaranya Air Asia, Silk Air, Lion Air dan Garuda Indonesia.

Terhadap kendala tersebut, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah membangun kerjasama dengan instansi terkait yakni PT Angkasa Pura II dengan mengadakan koordinasi dan rapat fasilitas. Selain itu, dalam mengatasi kendala dimaksud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat kepada PT Angkasa Pura II untuk melakukan perluasan tempat terkait dengan proses dan mekanisme layanan keimigrasian baik kedatangan maupun keberangkatan. Untuk Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, pengawasan dilakukan baik saat baru tiba di Indonesia, pengajuan izin tinggal sampai dengan pengawasan terhadap kegiatan dan aktifitas selama berada di Indonesia. Kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Sulawesi Selatan diantaranya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yakni Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi. Selain itu, pengawasan juga dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Timpora (Tim Pengawas Orang Asing) yang terdiri dari stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan. Timpora tersebut melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing mulai dari tingkat wilayah hingga ke tingkat kecamatan.

Pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dilakukan dengan terjun langsung ke perusahaan-perusahaan yang memperjakan tenaga kerja asing. Adapun tindak lanjut dari kegiatan pengawasan keimigrasian yang telah dilaksanakan adalah penegakan hukum keimigrasian berupa pemberian

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pen deportasian hingga penegakan hukum melalui proses hukum (*projusticia*). Tindak lanjut pengawasan keimigrasian yang telah dilakukan pada tahun 2019 di wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- WNA yang ditahan di Rudenim : -
- Pen deportasian : 101 orang WNA;
- Projusticia : 3 orang Warga Negara China;
- Data Perlintasan :
2017 : 17.457 orang;
2018 : 16.457 orang;
2019 : 18.657 orang.

Pembentukan Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi terkait pemberantasan korupsi dan menindaklanjuti laporan praktik pungli pada satuan kerja masing-masing; Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

Pendampingan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada seluruh Satuan Kerja terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar; Melakukan survey terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan survey integritas pada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Adapun hasil survey di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- IPK : 14.22 (Skala 15);
- IKM : 19.07 (Skala 20);
- Integritas : 91.14 (Skala 100);

Pemberian layanan pengaduan kepada masyarakat sebagai mekanisme *complain* melalui aplikasi e-Lapor. Pada tahun 2019, terdapat 17 (tujuh belas) aduan yang masuk melalui aplikasi e-Lapor dan telah tuntas ditindaklanjuti.

Pendalaman oleh Anggota Tim Komisi III DPR RI

a) Supriansa (F-Golkar)

- Mengapresiasi jajaran Kakanwil terutama terkait Lapas Kelas IA Makassar yang tadi dikunjungi.
- Terkait persoalan Orang Asing, agar benar-benar diantisipasi agar tidak masuk oknum-oknum yang kemudian berpotensi menjadi teroris
- Terkait persoalan keimigrasian, saya menyoroti terkait peredaran narkoba yang berkaitan dengan persoalan Lapas yang dikendalikan oleh bandar narkoba dari situ.
- Lapas Soppeng yang sudah *over capacity* menjadi persoalan tersendiri mengingat akan berpotensi menjadi membludaknya bandar narkoba disitu.
- Meminta agar predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tidak membuat aparat Lapas untuk terlena untuk terus meningkatkan dan mempertahankan hal tersebut.
- Meminta Kakanwil Kemenkumham menyampaikan keluhan ataupun persoalan yang ada kepada Tim Komisi III yang berkunjung disini.

b) Andi Rio Idris Padjalangi (F-Golkar)

- Terkait persoalan Lapas Narkoba, yang mengedarkan narkoba dan keluar berpotensi sebagai bandar. Meminta ketegasan Kakanwil terkait oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya, bila perlu dipecat.
- Terkait pen deportasian, ada berapa WNA yang telah di deportasi?
- Terkait lahan Kanim Imigrasi di Kabupaten Bone, sudah diatensi oleh Pemda, dan akan terus dikawal dan didorong
- Terkait persoalan HAM, apa ada kasus HAM disini yang perlu kita dorong untuk menjadi atensi bagi Kepolisian?

c) Sarifudin Sudding (F-PAN)

- Terkait kondisi anggaran yang ada, termasuk soal sarana dan prasarana, memang dilihat bahwa persoalan sarana prasarana disini dibandingkan dengan daerah lain masih jauh dari layak.
- Terkait penghuni narkoba sebanyak 85% menjadi penghuni Lapas menunjukkan bahwa bandar narkoba di Sulsel ini masih cukup tinggi, lalu bagaimana Kakanwil mengantisipasi bandar narkoba di Lapas ini berkomunikasi dengan orang luar? Begitu pula dengan berbagai daerah lain yang juga sama modusnya dengan mengedarkan/mengendalikan narkoba dari Lapas. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh sipir ini, saya pernah mengusulkan untuk menaikkan remunerasi bagi para sipir ini.
- Menyangkut PNBP, khususnya terkait HAKI agar lebih ditingkatkan dan difasilitasi untuk ditingkatkan.
- Terkait Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang dan Sitaan), agar dapat dikontrol dengan baik sehingga asset yang ada dapat terus dimanfaatkan.

d) Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)

- Mengapresiasi terkait kebersihan Lapas dan pengelolaan Lapas yang baik. Dan juga mengapresiasi terkait predikat WBK yang didapat beberapa Lapas di Sulsel ini meskipun dalam kondisi over kapasitas ditengah kondisi anggaran minimum yang diterima.
- Saya juga mendukung terkait sarana prasarana yang ada di bandara tadi.
- Terkait Rupbasan, mau dilanjutkan atau tidak? Mengingat jaksa ada sendiri, polisi ada sendiri, bagaimana ini ? Harus kita atur dalam regulasi dan kita butuh masukan dari Bapak/Ibu
- Terkait politik anggaran, memang minimal sekali terutama anggaran Litbang yang hanya 67 juta per tahun.
- Terkait penataan kepegawaian (rotasi dan mutasi), menjadi aneh terkait proses ini yang diatur oleh Pusat namun tidak mandiri terkait proses kepegawaiannya.
- Terkait Rudenim, apa efektifkah? Apa terwujud keadilan disitu?
- Terkait pengawasan Orang Asing, khususnya Pare-Pare. Mempertanyakan terkait pengawasan Orang Asing disana?
- Terkait status faktual keorganisasian partai politik, mengingat dalam waktu dekat akan digelar Pemilu.

Jawaban atas pertanyaan Anggota Tim Komisi III DPR RI akan dijawab secara tertulis.

II. Pertemuan dengan Jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer III-16 Makassar

a) Pengadilan Tinggi

Mendapat pagu anggaran Rp. 35.592.476.000,-

Adapun perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

Perdata Banding, pada tahun 2019 sejumlah perkara sisa tahun 2018 : 77 perkara, perkara masuk : 467, perkara putus : 459, sisa 2019 : 85, sisa 2018 : 77, masuk : 467 putus: 459 dan sisa 2019 : 85. Selanjutnya, terkait perkara Pidana Banding, pada tahun 2019 sebagai berikut: sisa perkara tahun 2018 : 74, perkara masuk : 763, perkara putus : 764, dan sisa 2019 : 73 perkara.

Adapun permohonan eksekusi di wilayah hukum PT Makassar sejumlah 259 kasus. Adapun Hambatan Pelaksanaan Eksekusi :

- a. Belum didukung oleh pengamanan yang memadai.
- b. Upaya hukum luar biasa baik PK, maupun perlawanan.
- c. Pelaksanaan eksekusi yang tereksesusi adalah pemerintah dalam hal ini kepala daerah, untuk pembayaran ganti rugi, contoh : Lahan Sentral Palopo, Makale, dll.

- d. Eksekusi yang dipertahankan oleh masyarakat adat, contoh: Daerah Kajang, Bulukumba, serta
- e. Perlindungan keamanan para Jurusita selaku pelaksana eksekusi termasuk panitera dan Ketua pra dan pasca pelaksanaan eksekusi.
Selanjutnya, Perkara yang Menonjol di Tingkat Banding adalah:
 - a. Pidana Narkotika dengan jumlah di tingkat banding sebanyak 432 perkara dari 837 total perkara pidana di tahun 2019.
 - b. Perkara yang berkaitan dengan ITE (pencemaran nama baik, penghinaan, dll).
 - c. Pidana anak yang terdiri dari pidana Narkotika sebanyak 13 perkara dan pidana pencurian sebanyak 13 perkara.
 - d. Perkara perdata yakni perdata gugatan dalam hal sengketa tanah dengan jumlah di tingkat banding sebanyak 153 perkara dari 544 perkara perdata di tahun 2019, kemudian disusul perbuatan melawan hukum, dan hutang piutang.
 - e. Perkara tipikor di tingkat banding dari semua perkara yang masuk hampir sebagian besar terdakwa para Kepala Desa dengan kasus pengelolaan dana desa.

b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Tahun 2020 mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: SP DIPA-005-01.2.526711/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 14.991.836.000,- dan DIPA Nomor: SP DIPA 005-05.2.526712/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp. 281.147.000,-.

Adapun Perkara Tahun 2019 yang diselesaikan ialah: Perkara Masuk : 152 Perkara. Semua Perkara tersebut telah diputus : 141 Perkara diputus tahun 2019 dan 11 Perkara diputus bulan Januari 2020 (11 perkara tersebut masuk bulan Nopember dan Desember 2019). Adapun untuk Perkara Tahun 2020: Jumlah Perkara yang masuk 30 perkara dengan rincian pada bulan Januari sebanyak 15 Perkara dan bulan Pebruari sebanyak 15 Perkara, Perkara yang sudah diputus : 16 Perkara dan Perkara yang sedang berjalan : 14 Perkara. Klasifikasi perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara-perkara : kepegawaian, pertanahan dan perizinan.

c) Pengadilan Tinggi Agama

Bahwa tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengelola 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dengan rincian masing masing sebagai berikut:

- DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 21.043.134.000,-
- DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 518.725.000,-

Kebutuhan dukungan anggaran di tahun 2021 dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat yaitu :

- Kebutuhan anggaran untuk rehab gedung kantor karena gedung kantor yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai dengan standar prototype Pengadilan disamping itu gedung kantor sudah tidak dapat menampung kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.
- Kebutuhan anggaran dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan di Propinsi Sulawesi Selatan, maka sangat dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai di Tahun 2020. Anggaran yang selama ini masih dirasakan sangat kurang adalah anggaran Belanja Modal berupa genset, meubelair sarana prasarana serta perangkat pengolah data.
- Kebutuhan legislasi Undang-undang untuk Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, hal ini sudah mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan dukungan juga dari DPRD

Sulawesi Barat untuk merealisasikan program tersebut, berupa rencana pemberian hibah lahan untuk gendung kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.

Bahwa perkara yang menonjol di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu perkara cerai gugat, kewarisan, harta bersama, cerai talak. Sedangkan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah dispensasi nikah. Dari 49 Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar mulai bulan Januari sampai dengan Februari kami rinci sebagai berikut :

- Cerai Gugat	: 15 Perkara
- Kewarisan	: 14 Perkara
- Harta Bersama	: 7 Perkara
- Cerai Talak	: 7 Perkara
- Hibah	: 1 Perkara
- Penguasaan Anak/ hadhonah	: 1 Perkara
- Nafkah Anak Oleh Ibu	: 1 Perkara
- Ekonomi Syariah	: 1 Perkara
- Lain-lain	: 2 Perkara
Jumlah	: 49 Perkara

Persentase penyelesaian perkara Januari s.d Februari 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Makassar mencapai 40.82 %.

Untuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusi diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu:

- Faktor biaya, biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan putusan, mengingat eksekusi pada dasarnya merupakan upaya paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka upaya itu melibatkan pihak keamanan. Biaya pengamanan inilah yang menjadi beban terbesar dalam eksekusi, bahkan jauh melebihi biaya panjar eksekusi. Terlebih lagi eksekusi riil berupa pengosongan bangunan atau tanaman diatas objek perkara dilakukan, pemohon eksekusi mengeluarkan lagi biaya yang sangat besar karena pihak pengadilan akan meminta biaya tambahan untuk menyewa alat-alat berat serta membayar biaya buruh untuk pengosongan yang jumlahnya melebihi jumlah biaya panjar eksekusi [bandingkan PERMA no 1 th2014 ttg pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat TIDAK MAMPU di Pengadilan pada psl 11 ayat 1 huruf g pembebasan biaya eksekusi bagi masyarakat tidak mampu],
- Faktor Aparat Penegak Hukum (Ketua Pengadilan, Panitera, Jurusita dan kepolisian): aparat penegak hukum yang dimaksud dalam pelaksanaan eksekusi adalah aparat yang melaksanakan eksekusi itu sendiri, yaitu pihak pengadilan agama dan seluruh personelnnya,serta aparat yang mendukung pelaksanaan eksekusi yang berhubungan dengan pengamanan eksekusi yaitu pihak kepolisian. Dukungan disini berarti bahwa kapasitas penegak hukum yang akan melaksanakan eksekusi, baik dari pihak pengadilan maupun dari pihak kepolisian yang mengamankan pelaksanaan eksekusi , pada dasarnya sudah cukup baik. Persoalannya adalah bahwa besarnya biaya operasional atas pengamanan pelaksanaan putusan pada umumnya dapat memberatkan pemohon eksekusi, akibatnya pihak pemohon eksekusi itu keberatan sehingga ada yang menunda pelaksanaan eksekusi nya untuk sementara waktu bahkan ada yang tidak berani mengajukan permohonan eksekusi sama sekali.Selain itu kurangnya pemahaman dan keberanian tentang eksekusi dari aparat penegak hukum.
- Permasalahan hukum yang paling sering ditemui terkait pelaksanaan eksekusi perdata adalah pada tahapan lelang eksekusi, dimana sulitnya menjual objek lelang eksekusi yang disebabkan oleh berbagai faktor.

d) Pengadilan Militer III-16 Makassar

Pagu definitif yang diterima Kantor Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

DIPA - 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI):

- Belanja Pegawai : Rp. 6.313.297.000,--
- Belanja Barang : Rp. 1.091.916.000,--
- Belanja Modal : Rp. 2.500.000,--
- Jumlah : Rp. 7.407.713.000,--
(Tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)
- DIPA - 05 (Ditjen Badilmiltun) :
- Belanja Pegawai : Rp. 115.930.000,--
- Jumlah : Rp. 115.930.000,--
(Seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat pada tahun 2019 adalah adanya perkara LGBT yang terjadi di lingkungan Prajurit TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar sebanyak 8 perkara dengan melibatkan 8 orang prajurit dari golongan Bintara dan Tamtama. Dari 8 perkara tersebut 1 perkara telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (BHT) dan 7 perkara masih dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, memohon kepada Komisi III DPR agar:

- Mohon dilakukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan siding keliling.
- Mohon dukungan untuk merealisasikan terbentuknya pengadilan militer tinggi IV di Makassar, dan
- Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 2 (dua) instansi yaitu Polisi Militer selaku Penyidik dan Oditur Militer selaku Penuntut Umum, agar kiranya kedua instansi tersebut diikut sertakan dalam berbagai kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI.

III. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta Jajaran

a) Anggaran

Pagu Anggaran yang diterima Kejati Sulsel tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	PAGU
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	52,208,083,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	101,800,000
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	367,860,000
Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	469,190,000
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	568,000,000
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	179,800,000
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	17,700,000
Jumlah Total Pagu	53,912,433,000

Kebutuhan Anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sulsel:

- Pembangunan Zona Integritas WBBM di Kejaksaan Tinggi Sulsel dan WBK di 22 Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan.
- Kegiatan penelusuran aset, baik dalam rangka penyelamatan aset negara dan daerah maupun aset yang terkait tindak pidana.

- Kegiatan counter surveillance (kontra penginderaan) dan kegiatan TABUR (tangkap buronan) dalam rangka penuntasan penanganan perkara (penangkapan DPO tersangka, terdakwa atau terpidana).
- Kegiatan pengamanan pilkada serentak, kegiatan pengamanan pembangunan proyek strategis daerah dan investasi.
- Kegiatan penanganan perkara Pidum (Pratut, Tut, Eksekusi), serta pembangunan dan pengembangan Case Management System (CMS) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).
- Kegiatan penanganan perkara Pidsus (Lid, Dik, Tut, Eksekusi) serta pembangunan dan pengembangan Case Management System (CMS) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).
- Kegiatan Jaksa Pengacara Negara di lingkup Perdata dan TUN, Litigasi dan Non Litigasi, penyelamatan aset negara/daerah serta pendampingan program pembangunan (Legal Assistance, Legal Opinion, tindakan hukum lainnya).
- Terbatasnya anggaran kegiatan JPN di Bidang Datun. Pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 120.122.000,- (seratus dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). Sedangkan Tahun 2020 hanya sebesar Rp. 17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

b) Pengawasan

Perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan :

Tindak Pidana Umum

a. Kasus Abu Tours

Nama terdakwa :

- 1) H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK BU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA.
- 2) NURSYAHRIAH MANSYUR ALS IBU RIA BINTI MANSYUR MAULANA
- 3) CHAERUDDIN Alias PAK HERU Bin M. LATANG
- 4) MUH. KASIM SUNUSI Bin SUNU DG. NOMPO

Putusan dan eksekusi :

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (antara lain Putusan Nomor. 3280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 1 Oktober 2019), para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing : H. Muhammad Hamzah Mamba, Nursyahriah Mansyur, Kasim Sunusi, dan Chaeruddin. Disamping itu, mereka pula di jatuhi denda sebesar 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Sedangkan untuk badan hukumannya sendiri (terdakwa PT. ABU TOURS) dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1 Milyar (saat ini putusan korporasi masih dalam upaya hukum banding).

Terkait barang bukti, baik tuntutan JPU maupun putusan hakim adalah dikembalikan kepada yang berhak melalui korotor yang telah ditunjuk berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Mks tgl 20 September 2018. JPU telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut pada hari Jumat tgl 07 Februari 2020 dengan cara menyerahkan barang bukti yang bernilai ekonomis (297 items) kepada kurator, antara lain: tanah dan bangunan, apartemen, uang tunai, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, unit usaha dll.. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian dan pelelangan dan hasilnya dikembalikan kepada para korban secara proporsional.

Tindak Pidana Khusus

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Sewa Tanah Negara Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar Tahun 2015 An. Tersangka Soedirjo Aliman Alias Jentang Tahapan penanganan : perkara dihentikan berdasarkan SP3 Nomor: Print 126/P.4/Fd.1/02/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Pertimbangan penghentian penyidikan:

1. 3 (tiga) perkara *splitsing* sebelumnya dinyatakan bebas dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Adanya putusan perdata yang dimenangkan oleh RUSDIN dan JAYANTI yang mengakui surat keterangan tanah garapan yang mereka miliki sah menurut hukum dan perjanjian yang mereka buat dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) juga sah menurut hukum;
 3. Hasil gelar perkara penyidik dan penuntut umum disimpulkan bahwa peristiwa atau perbuatan dalam perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi.
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi/Suap pada Proses Penganggaran Proyek Irigasi pada Dinas PSDA di Kab. Bulukumba TA 2017
Tahapan Penanganan: Pemeriksaan Saksi dan Pengumpulan Bahan dan Dokumen
Kendala dalam Penanganan :
 1. *Framing* melalui pemberitaan selama ini yang seolah-olah menyatakan telah terjadi suap pada proses penganggaran DAK Tambahan Tahun 2017 sebesar 49 Milyar rupiah, namun fakta dalam penyidikan : serah terima uang sebesar 800 juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari proses pengajuan anggaran DAK tambahan tahun 2017 pada Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba, adapun anggaran DAK senilai 49 Milyar tidak ditemukan dalam APBD tahun 2017.
 2. Kurang kooperatifnya pihak-pihak yang dimintai keterangan dan masih adanya beberapa dokumen yang diperlukan, sedangkan pembuktian suap di luar proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
 - Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan/Proyek Pembangunan Bendungan Jaringan Air Baku Sungai Tabang Kec. Maiwa Kab. Enrekang TA 2015.
Tahapan penanganan : pemeriksaan saksi, pemeriksaan fisik serta pengumpulan bahan dan dokumen.
Kendala :
 1. Kegiatan dilaksanakan di 126 lokasi di wilayah Kabupaten Enrekang, dan titik lokasi berada di area yang berjauhan dengan medan yang sangat sulit untuk dapat dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli.
 2. Dokumen yang dibutuhkan sangat banyak dan saksi yang diperiksa juga sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengumpulan bahan dan keterangan.
- Permasalahan dalam penanganan perkara antara lain:
- Terbatasnya anggaran penanganan perkara, pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tahun 2020 hanya sebesar Rp. 179.800.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menangani perkara tipikor dan TP Khusus lainnya, selain itu juga melakukan penuntutan perkara yang berasal dari penyidik Polda Sulsel.
 - SDM (kuantitas dan kualitas staf Tata Usaha) yang melakukan pengadministrasian perkara, menangani Case Management System (CMS) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), dan
 - Masih ditemui berkas perkara yang bolak balik antara Penyidik dan JPU.

Pendalaman Anggota Tim Komisi III DPR

a) Eva Yuliana (F-Nasdem)

- Mengapresiasi jajaran khususnya Datun telah melakukan penyelamatan asset negara. Meminta Asdatun dan jajaran untuk melakukan koordinasi kepada Kepala Daerah terkait pengelolaan asset daerah namun terkendala anggaran yang minim membuat persoalan ini sulit dalam kerangka penyelamatan asset daerah tersebut.
- Mengapresiasi Jaksa *Goes to Campus*, dengan melibatkan Anggota Komisi III DPR dari Dapil Sulsel ini
- Terkait persoalan dana desa, berharap agar program Jaga Desa lebih serius untuk dilakukan pendampingan oleh kejaksaan untuk meminimalisir penyalahgunaan maupun kesalahan.

b) Sarifudin Sudding (F-PAN)

- Persoalan anggaran minim yang diterima kejaksaan dalam penanganan kasus Tipikor, saya meragukan komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat pemberantasan korupsi ini. Minimnya anggaran ini menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan jangan sampe jaksa minta anggaran dari kiri kanan dengan pihak yang berperkara
- Mempertanyakan kasus Jentang yang bebas padahal
- Saya menaruh perhatian terhadap perkembangan modus kejahatan yang berkembang di Makassar antara lain narkoba,
- Meminta Kajati untuk tegak lurus dalam penegakan hukum dan jangan mau diintervensi oleh perkembangan politik
- Menanyakan perkembangan kasus Imelda

c) Santoso (F-Demokrat)

- Meskipun Tp4D dibubarkan, namun tetap saja oknum jaksa yang meminta proyek di daerah, meminta perhatian Kajati terkait hal ini

d) Achmad Dimiyati Natakusumah (F-PKS)

- Terkait anggaran minim, berpotensi jaksa melakukan pungli.
- Terkait pasca dibubarkan TP4D, bagaimana pengawasan terhadap penyimpangan anggaran daerah
- Bertanya kepada Aspidsus, sudah berapa banyak kasus Tipikor besar yang ditangani
- Bertanya kepada Asdatun, sudah berapa banyak kerjasama yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah?
- Kepada Aspidum, persoalan narkoba besar apa yang sudah ditangani?
- Kepada Aswas, ada berapa banyak jaksa nakal yang terlibat dan sudah dihukum?
- Kepada Asbin, berapa kekurangan jaksa di Sulawesi Selatan?

e) Ade Rossi Khoirunnisa (F-Golkar)

- Terkait jaksa nakal
- Terkait tuding LSM ACC bahwa Kejati dituding tidak transparan?
- Terkait korupsi dana desa, bahwa jaksa dan polri diusulkan jadi pengawas, agar kita itu benar agar jangan sampai citra Jaksa menjadi buruk seperti TP4D dulu.

f) Supriansa (F-Golkar)

- Terkait kasus di Pare-Pare, menanyakan terkait keberlanjutan kasus tersebut
- Terkait pembubaran TP4D, bagaimana respon dan antisipasi Kejaksaan?
- Terkait perpanjangan penahanan di Kapolda, kasus perkara kriminalisasi terhadap pers tidak perlu sejauh itu karena saya melihat ini hanya kasus pencemaran nama baik semata.
- Terkait persoalan dana desa yang nilainya kecil, agar tidak perlu dinaikkan perkaranya ke tingkat penyidikan untuk mengurangi over kapasitas yang sudah banyak sekali.

g) Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)

- Apresiasi dan mempertahankan Kajati untuk dilanjutkan dalam memimpin kejaksaan
- Mendukung *full* segala kebutuhan anggaran terutama anggaran Kejari yang ada di pelosok.
- Terkait persoalan penebangan kayu, di Luwuk Timur oleh persoalan Brasil, dilakukan di kawasan hutan lindung, meminta agar dinaikkan ke tingkat penyelidikan saja.
- Terkait asset di beberapa K/L, Kementerian Perhubungan c.q. Pelindo 4 yang dikuasai oleh pihak yang tidak benar dengan menggunakan masyarakat untuk kepentingan komersial, meminta untuk dilakukan penyelidikan terhadap para Lurah dan Camat yang menerbitkan surat hak garap kepada masyarakat secara

berlebih. Ingin kejaksan memeriksa pihak K/L agar memeriksa pejabat yang melepas asset tersebut kepada swasta.

- Terkait masalah Imelda Obey dalam kasus pengelolaan Alkes, agar Jaksa segera serius menggarap kasus ini dan meminta ditangkap
- Meminta perhatian kasus Jentang
- Meminta kasus Muhammad Asrul (dalam P-19) terkait perkara kebebasan pers
- Terkait penegakan kasus hukum Tipikor
- Masalah terkait konsistensi tuntutan, terhadap perkara terhadap perempuan dan anak dalam narkoba, meminta ada Tim Khusus di kejaksan untuk memeriksa hasil assessment yang dilakukan oleh Polisi dan BNN
- Meminta penjelasan terkait perkara *Abu Tour*
- Terkait persoalan Pilkada

Jawaban Kajati

- Telah melakukan sinergitas antara Kajati dengan Kajari, telah melakukan seleksi dan koordinasi terkait perkara yang berkaitan dengan asset daerah dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pendapatan daerah
- Terkait dana desa, sesuai arahan Jaksa Agung, agar tidak menindak perkara-perkara yang nilai nominalnya kecil
- Terkait perkara narkoba, kami akan melihat hasil assessment dr BNN dengan mengingatkan untuk tidak menggunakan pasal 122
- Menegaskan bahwa Jaksa dan pegawai Kejaksan untuk tidak ikut campur atau berpihak dalam urusan politik
- Terhadap Jaksa Nakal, kami melakukan tindakan yang luar biasa berat baik sebelum WBK maupun dengan ada WBK sekarang. Buktinya, Aswas dicopot dari jabatannya dan asisten dibawahnya juga ditindak. Bahkan kami memiliki mobil pelacak sinyal untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang
- Terkait kasus Camat yang 30% memang sudah ditangi Polri dan kami hanya meneruskan saja dengan nilai perkara 84 Milyar.

IV. Pertemuan dengan Kapolda dan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan

Penjelasan Kapolda

a) Anggaran

Pagu Alokasi Anggaran Poldasulsel T.A. 2020 sebesar Rp. 2.187.569.967.000,- dengan komposisi:

- Belanja Pegawai, Pagu sebesar Rp. 1.375.892.097.000,- (62,90%)
- Belanja Barang, Pagu sebesar Rp. 747.406.020.000,- (34,17%)
- Belanja Modal, Pagu sebesar Rp. 64.271.850.000,- (2,94%)

Adapun sumber anggaran terdiri dari :

- Rupiah Murni Rp. 1.963.043.482.000,- (89,74%)
- PNBPD Rp. 113.568.626.000,- (5,19%),
- BLU Rp.110.957.967.000,- (5,07%)

Selanjutnya Program Prioritas Poldasulsel yaitu :

1. Pilkada serentak di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota

Adapun kendala yang dihadapi dimana pengajuan anggaran pengamanan Pilkada tersebut yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten/Kota apabila dirata-rata NPHD (Hibah) hanya disetujui 63%, sisa anggaran NPHD dialokasikan dari DIPA Polri yang berakibat potret anggaran Polri akan terganggu.

2. Ops Aman Nusa II (Bencana Alam)

Tahun anggaran 2020 Poldasulsel dan Jajaran tidak menerima hibah anggaran pengamanan bencana alam (Aman Nusa II), yang mana anggaran ini teralokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga anggaran untuk memenuhi kegiatan tersebut dialokasikan dari sumber dana Kontinjensi Poldasulsel, sebagai gambaran tahun 2019 terdapat devisa sebesar Rp. 3.575.448.000,-

Usulan penambahan dan penguatan jaringan Command Center Polrestabes Makassar sebesar Rp. 8.336.179.000,-. Command Center Polrestabes Makassar selama ini hanya dapat memonitor situasi yang terjadi di lapangan karena Servernya berada di Pemkot Makassar, oleh karena itu guna melengkapi agar lebih up to date sesuai dengan perkembangan IT

b) Pengawasan

Penjelasan Kapolda Sulawesi Selatan terkait dengan Penanganan perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat yang ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajaran, Sebagai berikut :

➤ **Perkara terkait Kebebasan Pers**

Kebebasan pers dengan laporan polisi Nomor LPB/347/IX/2019/SPKT Tgl 26 September 2019, dengan Pelapor atas nama Muh. Darwin yang Berprofesi sebagai wartawan dengan laporan dugaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang atau penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 170 atau Pasal 351 KUHPIDANA. Perkembangan penyidikan hingga saat ini, Proses sidik.

➤ **Tindak Pidana ITE (Informasi Transaksi Elektronik)**

Terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau penistaan yang dilakukan melalui media online dalam bentuk berita sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/475/XII/2019/SPKT tgl 19 Desember 2019 dengan pelapor atas nama Sdr Farid Kasim Judas dan terlapor atas nama Muh. Asrul yang mengaku berprofesi sebagai wartawan berita pada media online, perbuatan terlapor diduga melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud Pasal 45 ayat (2) JO Pasal 28 Ayat (2) UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

➤ **Tindak Pidana Perbankan**

Kasus Bank Mandiri kantor cabang sidrap dengan Tersangka Atas Nama Andi Rahmat Samaiyo Alias Rahmat Bin Samaiyo Selaku Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Sidrap, telah melakukan Tindak Pidana Perbankan yang menyebabkan kerugian 9 (Sembilan) Orang Nasabah senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) perkembangan penyidikan hingga saat ini berkas perkara telah dilimpahkan kejaksaan tinggi Sulawesi selatan pada Tanggal 13 Februari 2020.

➤ **Tindak Pidana Cyber**

Telah terjadi dugaan tindak Pidana ITE dengan modus arisan online yang menimbulkan kerugian terhadap korban sebagai peserta arisan online, perbuatan tindak pidana dilakukan mulai dari bulan Mei sampai dengan November 2019 dengan tersangka atas nama Kelvina Laurens (Proses Penyidikan).

➤ **Tindak Pidana Korupsi (OTT)**

Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kantor dinas pendidikan Kab. Sidrap dengan modus operandi mengumpulkan Dana melalui setoran dari para kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-kabupaten sidrap. Pengungkapan kasus dilakukan melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polda Sulawesi Selatan dengan barang bukti uang senilai Rp. 579.170.000,- (Lima ratus Tujuh Puluh Sembilan Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 2 maret 2020 dengan Tersangka H. Syahrul Syam (Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Sidrap) dan Kawan-kawan.

Penjelasan Kapolda Sulawesi Selatan Terkait dengan Kesiapan Polda Sulawesi Selatan dalam pengaman Pilkada serentak tahun 2020 sebagai berikut:

Bahwa diwilayah Sulawesi selatan yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebanyak 12 Kab/Kota, dengan Rincian sebagai berikut :

- Kota Makassar
- Kab. Barru
- Kab. Bulukumba

- Kab. Gowa
- Kab. Kepulauan Selayar
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara
- Kab. Maros
- Kab. Pangkep
- Kab. Soppeng
- Kab. Tana Toraja, dan
- Kab. Toraja Utara

Dalam rangka Pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 Polda Sulsel melibatkan kekuatan sebanyak 14.021 Personel, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahapan kampanye sebanyak 3.756 pers.
- Tahapan Masa Tenang 1.502 Pers.
- Tahap pemungutan suara 5.007 Pers.
- Tahap Rekap dan Hitung Suara 1.252 Pers.
- Dan tahap penetapan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih sebanyak 2.504 Pers.

Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, Polda Sulsel dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana berupa:

- Kendaraan rantis sebanyak 6 unit,
- Ranmor R6 25 unit,
- Ranmor R4 167 unit,
- Ranmor R2 796 unit,
- Senpi genggam sebanyak 2.564 pucuk,
- Dan berbagai macam peralatan lainnya, yang keseluruhannya dalam kondisi baik.

Dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak tahun 2020 yang aman dan kondusif, Polda Sulsel telah melaksanakan upaya :

- Cipta Kondisi: Dengan membentuk Satgas Nusantara Daerah Polda Sulawesi Selatan dengan melakukan kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) seperti Patroli di daerah rawan Kriminalitas serta melakukan kegiatan sambang terhadap masyarakat.
- Peningkatan Kemampuan Personel pengamanan Pilkada Serentak melalui Latihan
 Dalam Rangka untuk mengantisipasi Perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah Polda Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Polda Sulawesi Selatan telah Menetapkan Rayonisasi penambahan perkuatan terhadap Polres yang membutuhkan bantuan perkuatan, melalui upaya perkuatan yang dilakukan oleh Polres terdekat, hal ini diperlukan apabila terjadi konflik di suatu wilayah maka Polres terdekat wajib melakukan Perbantuan dengan mengirim personelnya. (Rayonisasi ini terbagi dalam 4 rayon). Begitupula terhadap penambahan BKO Pasukan Brimob terhadap wilayah-wilayah yang terjadi Kontinjensi telah dilakukan pembagian kekuatan untuk Back Up wilayah yang terbagi atas 3 Zona, dengan kekuatan personel brimob yang ada di Makassar, Parepare, Bone dan Luwu Utara.

Sedangkan untuk membantu perkuatan Polda pada pengamanan Pilkada serentak tahun 2020, juga turut dilibatkan personel TNI untuk bantu/Back Up pengamanan berupa kegiatan Patroli Skala Besar gabungan TNI/Polri, Pengamanan Kantor KPU dan Bawaslu dan pengamanan pada objek Vital serta sentra ekonomi. Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 pada Kab/Kota di wilayah Polda Sulawesi Selatan yang Perkiraan rawan kerusuhan antara lain:

- Pilkada Kota Makassar
 Perkiraan kerawanan berupa : Fanatisme massa pendukung yang berlebihan, adanya politik dinasty, bagi-bagi uang/ sembako, fenomena kotak kosong, adanya SKD (Surat Keterangan Domisili) sebagai pengganti KTP serta adanya Ormas yang berpihak kepada salah satu Paslon.
- Pilkada Kab. Luwu timur

Perkiraan kerawanan berupa : Dukungan fanatik dari Ormas, Petahana/Incumbent akan berhadapan (Bupati VS Wabub), adanya isu sara/hoaks, kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat SDM pemilih yang rendah, serta figur petahana yang unggul.

- Pilkada Kab. Luwu Utara
Perkiraan kerawanan berupa : Penyelenggara Pilkada mendapatkan sanksi DKPP, eksodus pemilih dari luar daerah, tawuran antar kampung , kondisi geografis yang sulit, serta SKD yang marak beredar.
- Pilkada Kab. Tana Toraja
Perkiraan kerawanan berupa: Calon yang maju punya sejarah konflik, kondisi ulit, tingkat partisipasi masih rendah serta data administrasi kependudukan yang belum valid.
- Pilkada Kab. Bulukumba
Perkiraan kerawanan berupa : Anggaran Pilkada yang minim, fanatisme pendukung yang berlebihan, adanya politik dynasty, konflik sosial antara perusahaan dan warga lokal masalah tanah adat, kondisi geografis yang sulit, sifat kesukuan yang sempit serta SKD untuk warga luar.

Adapun Solusi pemecahan yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan terkait isu-isu yang rawan menimbulkan kericuhan pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 antara lain :

- Meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi;
- Meningkatkan sinergitas dengan penyelenggara Pilkada;
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini agar tidak menjadi ancaman terganggunya proses tahapan Pilkada serentak tahun 2020;
- Menghimbau masing-masing paslon/simpatisan agar melakukan kampanye positif untuk mensukseskan Pilkada serentak tanpa isu SARA;
- Mengoptimalkan penggalangan intelijen terhadap para tomas, todat, toga dalam rangka mewujudkan situasi kondusif pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020;
- Menjaga Netralitas TNI-POLRI dan penyelenggara Pemilu agar tidak terbawa pada kepentingan politik;
- Meningkatkan sinergitas TNI-POLRI dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020;
- Meningkatkan patroli cyber untuk mencegah berita provokatif;
- Melakukan pengamanan melekat kepada masing-masing Paslon;
- Tingkatkan Pengamanan tertutup dan terbuka terhadap kantor KPU dan Bawaslu;
- Pengamanan tertutup secara melekat terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu;
- Perketat pengamanan tertutup dan terbuka terhadap percetakan Surat Suara;
- Perketat penjagaan dan pengamanan tertutup terhadap gudang Logistik Pilkada;
- Melakukan pengawalan terhadap Distribusi logistik Pilkada sampai tujuan;
- Pengamanan terhadap jalannya pemungutan suara, Rekap Suara, Penetapan dan Pelantikan Calon Terpilih.

Penjelasan Kepala BNNP

- a) Anggaran

Pendalaman Anggota Tim Komisi III DPR

- a) **Sarifudin Sudding (F-PAN)**

- Mengevaluasi operasionalisasi pelaksanaan tupoksi, khususnya terkait persoalan narkoba. Ingin agar dalam pemberantasan narkoba jangan ada toleransi dan ruang dalam pemberantasan narkoba tersebut. Bagaimana sinergitas antara dua institusi (Polda dan BNNP) dapat berjalan dengan baik? Bandar narkoba yang kelihatan saja ini kenapa susah sekali untuk diberantas? Kalau tadi dipaparkan jalur sindikat narkoba, kenapa ini tadi tidak diputus?

- Jika ada persoalan dan kendala, utamanya terkait anggaran, sampaikan saja.

b) Arteria Dahlan

- Terkait kasus Jentang, atas nama keadilan dan penegakan harus diproses.
- Terkait persoalan log kayu di Luwu Timur yang berasal dari hutan lindung, dimohon penyelidikan.
- Terkait kasus Imelda Obey, diminta atensi dari Polda
- Terkait BNNP, minim anggaran tetapi terus semangat. Informasi terkait peta jaringan tersebut agar diselesaikan dengan lebih terukur dan tepat sasaran

c) Supriansa

- Terkait persoalan dalam perkara kebebasan pers
- Apresiasi kepada Kapolresta Makassar yang apresiatif

Terkait dugaan korupsi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pare-Pare, meminta atensi Kapolres Pare-Pare.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Maret 2020
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Komisi III DPR RI,
Ketua,

DR. IR. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.